

Belanja Modal- 2 Proyek di Wajo dan Bulukumba Sulsel Lambat Pengerjaan, Imbas Bencana Alam



Kepala Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang, Andi Darmawan Bintang

Sumber gambar:

<https://makassar.tribunnews.com/2024/09/20/2-proyek-di-wajo-dan-bulukumba-sulsel-lambat-pengerjaan-imbis-bencana-alam>

Dua proyek irigasi di Wajo dan Bulukumba Sulawesi Selatan lambat penyelesaian.

Keduanya yakni Irigasi Cilellang di Wajo, serta Irigasi Bongki-Bongki di Bulukumba.

Pasalnya, bencana alam yang terjadi beberapa waktu lalu.

Proyek pengerjaan pun masih dikebut hingga kini Jumat (20/9/2024).

Sebab targetnya bisa dirampungkan pada akhir 2024 ini.

"Tahapan di Wajo kan kemarin sekitar Mei-Juni sudah dikontrak, tapi karena ada banjir sehingga terlambat dimulai. Baru ada deviasi, dua minggu deviasi sekitar 30 lebih. Kita harap bisa diatasi dalam waktu dekat, sehingga bisa mengejar keterlambatan," jelas Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACK-TR) Sulsel Andi Darmawan Bintang.

"Jarak suplai pasokan jauh dan butuh waktu," lanjutnya.

Dirinya optimis proyek ini bisa selesai diakhir 2024.

Faktor alam juga menghambat proyek irigasi di Bongki-Bongki Bulukumba.

Longsor beberapa waktu lalu membuat proyek ini harus telat dikerjakan.

"Bongki-bongki, Bulukumba persoalannya karena terjadi bencana longsor. Sehingga rencana sebelumnya harus di review kembali," lanjutnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Inspektorat Sulsel ikut turun mengawal proyek ini.

Andi Darmawan Bintang pun sudah melaporkan progres dua proyeknya dalam rapat terbatas pada Kamis (19/9/2024) sore di Kantor Gubernur Sulsel.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

"Memastikan semua proses dari perencanaan, pengadaan sampai nantinya pho dipantau KPK dan memenuhi unsur akuntabilitas sesuai aturan berlaku," kata [Andi Darmawan Bintang](#).

Inspektorat Sulsel sudah mendapat arahan dari KPK untuk turun memantau proyek tersebut.

Lalu melihat kendala apa saja yang ada di lapangan.

"Ada beberapa faktor bisa menjadi kendala pengerjaan itu, kami disuruh meninjau proyek itu. Namanya check and balance. Misalnya irigasi di [Wajo](#) pengerjaannya molor karena banjir. Informasi dari Kadis SDA optimis bisa selesai tepat waktu," jelas Kepala Inspektorat Daerah Sulsel Marwan.

KPK memiliki peran untuk mengawasi proses kedelapan proyek tersebut.

Tujuannya memastikan dalam pelaksanaannya tidak terjadi tindak korupsi maupun upaya mencegah korupsi.

KPK pun bergerak dari mulai pemilihan pihak ketiga sampai pelaksanaan proyek tersebut

"Kalau kami konsentrasinya mencegah tindak pidana korupsi dari proses pengadaan pemilihan vendor sampai pelaksanaannya," kata Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV KPK Edi Suryanto. (*)

Adapun dalam hal tersebut, [Jembatan](#) penyebrangan di Kanal Pampang, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ambruk saat sementara pengerjaan.

Insiden ambruknya jembatan yang lokasinya berada di samping kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu, terjadi pada Rabu (23/10/2024) malam.

1. Proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi

Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan / Istimewa

[Proyek](#) pembangunan jembatan itu merupakan milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi dengan Konsultan Trimako Abdi Konsulindo.

Pengerjaan proyek dimulai pada 14 Juni 2024 dengan estimasi waktu pengerjaan 150 hari. Adapun total anggaran yang bersumber pada [APBD](#) 2024 itu, sebesar Rp 771.555.000 atau Rp771 juta lebih.

2. Satu pekerja luka

Ketua RT 04 Pampang, Kahar Tika (54) mengatakan, ambruknya jembatan tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 Wita.

"Sekitar jam 7 tadi kejadiannya. Sementara pengecoran nah ambruk," kata Kahar Tika saat ditemui di lokasi.

Dia menuturkan, pengecoran dilakukan oleh empat pekerja beserta seunit truk molen. Namun saat pengecoran berlangsung jembatan tiba-tiba ambruk.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

"Ini sudah 3 bulan berjalan pengerjaannya, rutin tiap hari. Ini sampai malam karena pengecoran. Empat orang pekerjanya, ada satu luka di bagian kaki," tuturnya.

3. Konstruksi rangka dari Surabaya

Lurah Pampang, Irsan Cahyadi mengatakan, proyek jembatan itu dimulai sejak Agustus 2024, dan sempat terhenti karena menunggu konstruksi rangka dari Surabaya.

"Sempat berhenti lama setelah pemasangan dudukannya di pinggir kanal. Kerangkanya itu dari Surabaya," kata Irsan.

Sumber Berita:

1. <https://makassar.tribunnews.com/2024/09/20/2-proyek-di-wajo-dan-bulukumba-sulsel-lambat-pengerjaan-imbis-bencana-alam>
2. <https://sulsel.idntimes.com/news/indonesia/darsil-yahya-mustari/pakai-apbd-rp771-juta-proyek-jembatan-di-makassar-ambruk-saat-dicor-c1c2>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.
- (4) (Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

